

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu

Implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 10 of 2017 in the Implementation of the Family Hope Program in Sidomulyo Village, Bilah Hilir District, Labuhanbatu Regency

Nur'aidah Azzahra

Program Studi Ilmu Administrasi Publik,

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: nuraidahazzahra4@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 10 of 2017 in the Implementation of the Family Hope Program in Sidomulyo Village, Bilah Hilir District, Labuhanbatu Regency. The type of research conducted is descriptive research with a qualitative approach. Based on the results of the study, it is known that the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 10 of 2017 in the Implementation of the Family Hope Program in Sidomulyo Village, Bilah Hilir District, Labuhanbatu Regency has been implemented, but there are several obstacles. target, Human resources in the implementation of the Family Hope Program in Sidomulyo Village are less competent, so many people should be entitled to benefits in the Family Hope Program, but in the field there are still many who have not benefited from PKH, the bureaucratic structure is in accordance with standard operating procedures (SOP), the disposition in the implementation of the family of hope program in Sidomulyo Village has been carried out well, but there are obstacles, namely the lack of awareness of the beneficiary families in carrying out their obligations as beneficiary families of the program. Hope Family.

Keywords: Implementation, Implementation, Family Hope Program.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu sudah terimplementasi, tetapi ada beberapa kendala Proses komunikasi dalam pelaksanaan program keluarga harapan belum berjalan dengan optimal karena penyampaian informasi masih belum tepat sasaran, Sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sidomulyo kurang berkompeten, sehingga banyak masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan manfaat dalam Program Keluarga Harapan, tetapi di lapangan masih banyak yang belum mendapatkan manfaat dari PKH, struktur birokrasi sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), Disposisi dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Sidomulyo sudah terlaksana dengan baik, namun ada kendala yaitu kurangnya kesadaran keluarga penerima manfaat dalam menjalankan kewajibannya sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Kata Kunci: Implementasi, Pelaksanaan, Program Keluarga Harapan.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh seluruh negara di dunia. Masalah kemiskinan menjadi kendala yang rumit sehingga suatu negara tidak dapat memiliki kemampuan untuk menghapus kemiskinan secara sendiri. Mayoritas masyarakat Indonesia berada pada taraf ekonomi yang rendah, hal ini menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia semakin bertambah tinggi dari tahun ke tahun. Dengan kondisi seperti ini membuat Indonesia menghadapi persoalan-persoalan rumit seperti tingkat kriminalitas tinggi, tingkat pendidikan rendah, dan tingkat kesehatan yang rendah. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berhak untuk mengatur dan mengurus negaranya sendiri. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan sangat kompleks terutama dalam bidang pendidikan. Sebab dalam amanat UUD 1945 sudah diterangkan bahwa tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu bentuk usaha menuju pendewasaan dalam kehidupan. Melalui pendidikan maka tercipta kehidupan yang lebih baik. Bagi setiap negara, pendidikan merupakan aspek penting yang mempunyai pengaruh bagi kemajuan negara di dunia. Tanpa pendidikan, maka suatu negara akan mengalami perkembangan yang sangat lambat.

Untuk mengurangi permasalahan kemiskinan, pemerintah memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan mulai dari penanggulangan berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha kecil. Salah satu program yang berbasis bantuan sosial dari pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2017 bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bagi anggota keluarga KPM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban KPM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat

memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Permasalahan yang sering muncul di lapangan saat mengimplementasikan program yaitu ketika pihak pendamping mengarahkan juga memberi tekanan kepada KPM agar mau mengikuti prosedur maupun aturan yang harus dituruti KPM harus mau memenuhi kewajiban dan hak sebagai peserta penerima manfaat dari program PKH, kadang-kadang masih ada sebagian masyarakat yang masih susah diberi tahu hanya mengiyakan saja tanpa benar melaksanakan sesuai perintah serta arahan yang telah di jelaskan dari pendamping PKH. Masalah lain yang sering datang juga ketika protes-protes yang dilayangkan kepada pendamping PKH, bahwa sebagian masyarakat tidak mendapatkan bantuan dan manfaat dari program itu. Selanjutnya ada masalah lain, seperti kurangnya respon dari stakeholder apabila diajak bekerjasama artinya tidak ada sinergitas kerja, ketika pihak pendamping menginginkan koordinasi dari pihak stakeholder, tetapi kurang tanggapan.

Untuk menjawab bagaimana kondisi dan situasi di atas maka dilakukan kegiatan penelitian, penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi berjudul, “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.”

Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan Dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sukmadinata (2006:72) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data yang signifikan berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan menganalisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam pembahasan sub bab ini merupakan kajian atau analisis data dari hasil wawancara dengan para narasumber di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis data sebagai berikut:

a. Adanya Proses Komunikasi dalam Pelaksanaan Kebijakan

Hal ini sesuai dengan Edward Depari yang menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu, mengandung arti, dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan pada penerima pesan. Maksud pesan disini seperti menyampaikan amanah dengan melalui komunikasi langsung atau bertatap muka sama penerima pesan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi telah dilaksanakan oleh Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir namun belum berjalan dengan optimal karena masih ditemukan beberapa kendala. Kendalanya yaitu: keterbatasan dalam mengumpulkan masyarakat dan stakeholders untuk dilakukan sosialisasi oleh petugas PKH di Desa Sidomulyo, dikarenakan jarak pendamping PKH yang jauh dari Desa Sidomulyo yang menyebabkan sulit melakukan pertemuan.

b. Adanya Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Seperti yang disampaikan oleh Hasibuan (2016) sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan masyarakat. Sumber daya manusia di Sidomulyo dalam pelaksanaan program keluarga harapan ini sudah menguasai bidangnya masing-masing. Namun karena ada beberapa kendala seperti pendataan yang dilakukan oleh kepala dusun tidak efektif yang menyebabkan banyak masyarakat yang tidak menerima manfaat dalam program keluarga harapan, sehingga sumber daya manusia dalam pelaksanaan program keluarga harapan di desa sidomulyo sudah melakukan tugas sesuai bidangnya masing-masing namun belum efektif.

c. Adanya Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan

Menurut Edward III dalam Indiahono (2009:32) struktur birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

Struktur birokrasi yang dilaksanakan oleh Desa Sidomulyo sudah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Hal ini dapat dilihat dengan adanya buku pedoman pelaksanaan PKH yang selalu dibawa oleh pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

d. Adanya Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan

Menurut Edward III dalam indiahono (2009:32) disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.

Dengan demikian adanya disposisi dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Sidomulyo ini sudah baik namun di lapangan belum berjalan dengan efektif disebabkan oleh kurangnya kesadaran keluarga penerima manfaat dalam menjalankan kewajibannya sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan disajikan lalu dibahas dalam permasalahan terhadap Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu belum berjalan dengan baik.

Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan yaitu:

1. Desa Sidomulyo sudah melakukan Proses komunikasi dalam pelaksanaan program keluarga harapan belum berjalan dengan optimal karena penyampaian informasi masih belum tepat sasaran.
2. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Sidomulyo kurang berkompeten, sehingga banyak masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan manfaat dalam Program Keluarga Harapan, tetapi di lapangan masih banyak yang belum mendapatkan manfaatnya. Padahal para pengurus PKH sudah menguasai bidangnya masing-masing, karena sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan dan diklat yang diadakan oleh Menteri Sosial.
3. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program keluarga harapan sudah dilakukan oleh Desa Sidomulyo. Hal ini dapat dibuktikan sebagaimana diuraikan pada penyajian data tentang hasil wawancara yang dilakukan beberapa narasumber bahwa struktur birokrasi sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
4. Bahwa disposisi dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Sidomulyo sudah terlaksana dengan baik, namun ada kendala yaitu kurangnya kesadaran keluarga penerima manfaat dalam menjalankan kewajibannya sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Dengan demikian keempat kategorisasi tersebut sudah dilaksanakan dan diterapkan di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu

Selanjutnya, terdapat beberapa kendala dalam proses implementasi seperti:

1. Kendala dalam penyampaian informasi yang dilakukan dengan sosialisasi Program PKH; sosialisasi program PKH yang dilakukan petugas PKH Desa Sidomulyo tidak maksimal sehingga banyak masyarakat belum mengetahui program PKH. Kendalanya yaitu: keterbatasan dalam mengumpulkan masyarakat dan stakeholders untuk dilakukan sosialisasi oleh petugas PKH di Desa Sidomulyo, dikarenakan jarak pendamping PKH yang jauh dari Desa Sidomulyo yang menyebabkan sulit melakukan pertemuan.
2. Kendala dalam proses pendataan penerima PKH; dalam proses pendataan penerima untuk menentukan peserta penerima PKH di Desa Sidomulyo mengalami berbagai kendala, diantaranya : data yang diambil dari data yang dikumpulkan oleh kepala dusun dipandang tidak mencerminkan keadaan masyarakat yang sebenarnya. Diindikasikan proses pendataan tidak dilakukan dengan prosedur yang benar, karena masih banyak masyarakat yang seharusnya menjadi peserta PKH, tetapi tidak terdaftar.

Saran

Adapun saran – saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh para penguru program keluarga harapan harus ditingkatkan lagi, agar penyampaian informasi dapat dilaksanakan dengan optimal. Sehingga penyampaian informasi bisa tepat sasaran.
2. Peningkatan sumber daya manusia harus dilakukan secara berkala oleh Desa Sidomulyo agar petugas program keluarga harapan dapat memberi arahan kepada masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan dengan tepat dan terarah.

Ucapan Terimakasih

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini. Penulisan artikel ilmiah ini dilakukan dalam rangka untuk menyelesaikan hasil dari Skripsi pada prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Daftar Pustaka

Covid, Era, Patimpeng Kabupaten Bone, And A. Wahdaniah. "Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar."

Dheby, Clara, Abdul Kadir Adys, and Muhammad Idris. "Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar." *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 3.2 (2017): 161-177.

Ibrahim, H. Amin. "Teori dan konsep pelayanan publik serta implementasinya." (2019).

Londah, Anggreini, Gustaf Budi Tampi, And Very Londa. "Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal Administrasi Publik* 4.53 (2018).

Nasution, Muhammad Reza Pahlevi. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan." (2017).

Rahmawati, Evi, and Bagus Kisworo. "Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan." *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment* 1.2 (2017): 161-169.

Sudaryanto, Sudaryanto, Soeparno Soeparno, and Lilis Ferawati. "Politics of Language in Indonesia (1975-2015): Study of History and Language Policy." *Aksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 3.1 (2019): 129-139.

Utomo, Dedy. "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)." *Jurnal Administrasi Publik* 2.1 (2014): 29-34.

Prichatin, Asti. *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada PKH desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)*. Diss. IAIN Purwokerto, 2019.

Zahrawati, Depi, and Henni Muchtar. "Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Nagari Malampah Kabupaten Pasaman." *Journal of Civic Education* 1.4 (2018): 384-394.